

## Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Papua Pada Tahun 2024-2025

Alfonsina Melissa Orocomna<sup>1\*</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [melisaway07@gmail.com](mailto:melisaway07@gmail.com)

### Article History:

Received : 07-01-2026

Accepted : 14-01-2026

**Keywords:** HIV/AIDS; Peran Pemerintah; Papua; Jayapura; ARV; Strategi Three Zero

### ABSTRAK

Provinsi Papua menghadapi kondisi darurat HIV/AIDS dengan angka penularan tertinggi di Indonesia, di mana tren penyebaran kini telah merambah populasi umum seperti remaja dan ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS pada periode 2024-2025. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah implementasi berbagai regulasi dan program strategis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat berperan dalam menetapkan strategi nasional "*Ending AIDS 2030*", menjamin ketersediaan obat Antiretroviral (ARV) gratis, dan menyediakan kerangka hukum melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua menjadikan penanganan HIV/AIDS sebagai program prioritas melalui Perda Nomor 8 Tahun 2010, penguatan layanan di Puskesmas sebagai garda terdepan, serta inisiasi edukasi melalui muatan lokal di sekolah. Meskipun kolaborasi multisektor dan layanan medis telah diperluas, tantangan besar tetap ada pada tingginya angka kasus baru di Kota Jayapura yang mencapai 1.200 kasus pada tahun 2025, yang dipicu oleh aktivitas prostitusi daring dan hambatan geografis serta stigma sosial.

### PENDAHULUAN

Kasus HIV/AIDS di Indonesia merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan, ditandai dengan dinamika epidemi dan persebaran kasus yang tidak merata antarwilayah. Sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 1987, pola penularan HIV di Indonesia mengalami pergeseran, dari penggunaan jarum suntik tidak steril menuju hubungan seksual berisiko, baik pada populasi kunci maupun populasi umum, termasuk ibu rumah tangga. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, sementara AIDS merupakan stadium akhir infeksi HIV yang ditandai dengan menurunnya kemampuan tubuh melawan penyakit.

Dalam konteks global, HIV/AIDS telah menjadi isu krusial dalam diplomasi kesehatan internasional karena dampaknya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan dunia. Sejak ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional pada tahun 2000, berbagai inisiatif global telah dikembangkan, termasuk pendanaan lintas negara dan pelonggaran hak paten obat, yang memungkinkan negara berkembang memperoleh akses terapi antiretroviral secara lebih terjangkau.

Di tingkat nasional, data Kementerian Kesehatan Indonesia periode 2012–2016 menunjukkan bahwa 81,8% penularan HIV terjadi melalui kontak seksual. Meskipun prevalensi nasional HIV berada di bawah 0,5%, beberapa wilayah seperti Provinsi Papua

menunjukkan tingkat kasus yang jauh lebih tinggi sehingga memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia merespons kondisi ini melalui komitmen mencapai target *Ending AIDS 2030* dengan strategi *Three Zero* serta program *Test and Treat*, yang menjamin akses terapi antiretroviral (ARV) secara gratis bagi seluruh pengidap HIV.

Keberhasilan strategi nasional tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan, ketersediaan obat dan alat diagnostik, serta edukasi dan pendampingan masyarakat. Namun, tingginya angka kasus di Papua menunjukkan adanya tantangan struktural, geografis, dan sosial yang memerlukan kajian lebih mendalam mengenai peran dan efektivitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi HIV/AIDS. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua pada periode 2024–2025.

Meskipun berbagai kebijakan nasional dan program penanggulangan HIV/AIDS telah diterapkan, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek epidemiologis dan klinis, sementara kajian yang secara khusus menganalisis sinergi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Provinsi Papua masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah efektivitas implementasi kebijakan tersebut pada periode terbaru, khususnya pasca-penetapan target *Ending AIDS 2030*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami kebijakan, program, serta implementasi peran pemerintah secara komprehensif dalam konteks sosial dan kelembagaan.

Analisis penelitian ini menggunakan kerangka *role performance* untuk menelaah bagaimana negara menjalankan perannya dalam penanggulangan HIV/AIDS, serta bagaimana konsepsi peran tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena kesehatan di mana virus HIV masuk ke dalam tubuh untuk menghancurkan sel imun yang bertugas melindungi manusia dari penyakit. Stadium akhir dari infeksi ini disebut AIDS, sebuah fase kritis di mana sistem kekebalan tubuh tidak lagi berfungsi secara optimal. Melalui strategi *Getting Three Zero* dan target *Triple 95s*, pemerintah berupaya meminimalisir dampak HIV dengan menekan jumlah virus lewat terapi ARV gratis sejak dini (*Test and Start*). Upaya ini diperkuat dengan skrining massal, layanan *mobile clinic*, dan tes *Viral Load* rutin guna menjaga kualitas hidup pasien. Selain itu, sinergi

dengan UNAIDS serta pelatihan tenaga kesehatan dilakukan untuk menghapus stigma dan menjamin kerahasiaan pasien sesuai standar internasional.

Angka kejadian HIV/AIDS di wilayah Jayapura menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Hingga tahun 2024, Kota Jayapura mencatat total 8.864 kasus kumulatif, yang kemudian diikuti dengan penambahan signifikan sebanyak 1.200 kasus baru selama periode Januari hingga November 2025. Sementara itu, Kabupaten Jayapura mencatat 5.985 kasus, memperkuat fakta bahwa penyebaran HIV di Papua telah mencapai tahap epidemi meluas yang merambah populasi umum melalui hubungan seksual tidak aman. Kondisi ini kritis karena mayoritas penderita berada pada usia produktif (20–49 tahun), sehingga mengancam masa depan pembangunan daerah. Meski skrining terus ditingkatkan dan menemukan ribuan kasus baru, tingkat kepatuhan pengobatan ARV masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kendala geografis, sulitnya akses layanan di pedalaman, serta kuatnya stigma sosial yang membuat pasien enggan melanjutkan perawatan.

Menurut World Health Organization menggolongkan HIV sebagai infeksi menular seksual yang membutuhkan pengendalian ketat melalui tes, penyediaan ARV bagi jutaan pasien, dan akses preventif seperti profilaksis pra-paparan (PrPP). Di Papua, hampir 60% penderita adalah wanita, dengan konsentrasi epidemi di Jayapura, Mimika, dan Jayawijaya yang dipicu oleh seks tidak aman serta penularan ibu ke anak. Meski pengobatan rutin memungkinkan pasien hidup produktif, tantangan utama tetap pada tingginya stigma dan terbatasnya akses medis, sehingga pencegahan menjadi prioritas krusial (Pemerintah Provinsi Papua, 2025).

Kementerian Kesehatan menerapkan strategi ABCDE sebagai panduan pencegahan: *Abstinence* (tidak seks bebas), *Be Faithful* (setia), *Condom* (penggunaan kondom), *Drug No* (hindari narkoba suntik), dan *Education* (edukasi untuk menghapus stigma). Khusus di Papua, penanganan diperkuat melalui sinergi pusat dan daerah yang mencakup pengalokasian anggaran, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta kebijakan berbasis kearifan lokal. Dalam kolaborasi ini, pemerintah pusat menjamin ketersediaan logistik medis seperti obat ARV, sementara pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

### **Peran Pemerintah Pusat**

Peningkatan kasus HIV/AIDS telah menjadi salah satu permasalahan pemerintah Indonesia yang sangat mendesak. Masalah ini bukan hanya soal angka yang terus naik, tapi juga soal bagaimana memastikan semua orang bisa mendapatkan obat dan layanan kesehatan yang layak tanpa merasa takut akan pandangan buruk masyarakat. Pemerintah pusat punya peran yang sangat penting sebagai pengatur strategi utama dalam melawan HIV/AIDS di Indonesia. Lewat Kementerian Kesehatan, pemerintah tidak hanya membuat aturan pengobatan yang berlaku di seluruh negeri, tapi juga bertanggung jawab penuh untuk memastikan stok obat ARV dan alat tes kesehatan selalu tersedia. Hal ini dilakukan agar jumlah penularan virus bisa ditekan dan semua masyarakat, dari kota sampai desa, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama.

Pemerintah memperkuat penanganan HIV/AIDS melalui regulasi terintegrasi yang menjamin akses tes mandiri dan pengobatan di Puskesmas seluruh Indonesia. Fokus utama saat ini diarahkan pada Provinsi Papua, yang mencatat prevalensi tertinggi (2,3%) pada periode 2024-2025, khususnya di wilayah Nabire, Mimika, dan Kota Jayapura. Meski secara nasional

tren epidemi cenderung menurun, kompleksitas tantangan di Papua menjadikan wilayah tersebut prioritas dalam agenda kesehatan nasional guna memastikan layanan berjalan tepat sasaran.

Peran pemerintah pusat dalam penanganan HIV/AIDS berlandaskan pada regulasi strategis yang terintegrasi. Berdasarkan Permenkes No. 21 Tahun 2013 dan No. 82 Tahun 2014, fokus utama diarahkan pada penguatan kerja sama lintas sektor, penyediaan layanan kesehatan bermutu di daerah terpencil, serta pengendalian faktor risiko melalui surveilans dan pengobatan terstandarisasi. Selain itu, Permenkes No. 51 Tahun 2013 mengatur pedoman teknis pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA) melalui empat langkah utama, termasuk pencegahan kehamilan tak terencana pada perempuan usia subur dan dukungan psikologis keluarga. Sesuai Perpres No. 72 Tahun 2012, pemerintah pusat bertanggung jawab penuh dalam menyusun standar pengobatan, mengawasi implementasi program di daerah, serta menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan secara nasional (Maya, 2020).

Melalui beberapa peraturan ini maka pemerintah pun menjamin ketersediaan obat ARV gratis di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk bagi warga tanpa BPJS guna menjaga privasi pasien. Layanan ini mencakup program PMTCT yang memungkinkan pasangan ODHA memiliki anak sehat dengan risiko penularan ke bayi mendekati nol. Didukung peran aktif tenaga medis di Puskesmas, HIV kini dikelola sebagai penyakit kronis yang memungkinkan pasien tetap produktif dan memiliki keluarga sehat melalui pengobatan rutin yang aman.

Puskesmas di Papua merupakan ujung tombak layanan kesehatan yang menyediakan fasilitas Voluntary Counseling and Testing (VCT) untuk deteksi dini HIV secara sukarela, rahasia, dan aman. Selain tes medis, petugas Puskesmas memberikan edukasi anti-stigma untuk menghapus rasa takut masyarakat, serta menjelaskan fakta bahwa melalui terapi ARV rutin, pasien dapat hidup sehat dan mencapai kondisi virus tidak terdeteksi (U=U) yang menghilangkan risiko penularan (Kemenkes). Upaya ini didukung oleh kampanye berkelanjutan dari lembaga seperti KPAN untuk memastikan informasi akurat sampai ke masyarakat, sehingga deteksi dini dapat dilakukan tanpa rasa takut akan diskriminasi. Melalui PMK No. 23 Tahun 2022, Pemerintah Indonesia menargetkan “*Ending AIDS 2030*” dengan strategi *Getting Three Zero* dan target *Triple 95s* pada tahun 2027. Langkah nyata yang dilakukan meliputi perluasan skrining, penyediaan profilaksis, dan kebijakan Test and Start untuk menjamin akses ARV gratis di Puskesmas. Guna menghapus stigma dan menekan jumlah virus, pemerintah juga menyediakan layanan *mobile clinic* serta tes *Viral Load* rutin yang disinergikan dengan standar global UNAIDS.

*United Nations Joint Programme on HIV/AIDS* merupakan lembaga internasional telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan program-program pengentasan masalah HIV/AIDS. UNAIDS berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia melalui enam prioritas strategis untuk menghentikan penyebaran HIV, termasuk pencegahan penularan seksual, transmisi ibu ke anak, serta perlindungan bagi pengguna narkoba suntik. Lembaga ini memberikan bantuan teknis berupa tenaga ahli untuk mengoptimalkan layanan VCT dan ARV, sekaligus menggalang dana internasional untuk pengadaan alat medis. Selain itu, UNAIDS aktif mengampanyekan penghapusan stigma melalui perlindungan hak ODHIV dan melakukan monitoring berkala guna memastikan efektivitas program di lapangan (Sya’ban, 2022).

Selain itu adapula pekerja sosial yang memiliki peran penting sebagai pendidik, advokat, dan konselor dalam mendukung pencegahan serta pemulihan ODHIV di Indonesia. Mereka bertugas memberikan edukasi yang akurat, menjamin akses layanan kesehatan, serta membantu pasien mengatasi kecemasan agar dapat kembali beraktivitas secara normal. Melalui kolaborasi dengan UNAIDS, sinergi ini bertujuan untuk memutus rantai penularan, menghapus diskriminasi, dan meningkatkan kesejahteraan hidup pasien di lingkungan sosial.

### Peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Peran pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya penanganan kasus HIV/AIDS, khususnya di Provinsi Papua yang hingga kini masih menghadapi tingkat prevalensi yang relatif tinggi. Pemerintah Provinsi Papua menempatkan penanganan HIV/AIDS sebagai prioritas strategis dalam rencana kerja 2024–2025 untuk menekan lonjakan kasus yang signifikan. Melalui landasan hukum Perda Nomor 8 Tahun 2010, pemerintah berperan sebagai koordinator utama dalam menjamin akses pengobatan ARV bagi seluruh ODHIV serta mengintensifkan program pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Selain penguatan layanan medis dan edukasi masyarakat, Pemprov Papua juga mengoptimalkan Sistem Informasi HIV dan AIDS berbasis digital untuk memastikan pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran di seluruh wilayah.

Pada bidang pencegahan pun pemerintah daerah juga menggunakan strategi *Three Zero* melalui edukasi masif, termasuk penerapan kurikulum muatan lokal dan pelibatan remaja sebagai agen perubahan. Mengingat situasi HIV/AIDS di Kota Jayapura telah memasuki fase darurat dengan akumulasi mencapai 8.864 kasus hingga 2025, kolaborasi multisektor antara pemerintah, LSM, dan lembaga keagamaan terus diperkuat. Penanganan kini difokuskan pada pengawasan prostitusi daring di wilayah titik merah seperti Waena dan Ardipura serta pengaktifan kembali Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk menjangkau usia produktif yang paling terdampak (Poernomo, 2025).

Puskesmas di Provinsi Papua berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan HIV/AIDS dengan menyediakan layanan deteksi dini dan pengobatan yang mudah dijangkau. Fungsi utamanya meliputi layanan Konseling dan Tes Sukarela (VCT) secara rahasia serta pemberian obat Antiretroviral (ARV) gratis melalui program Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (CST). Selain itu, Puskesmas menjalankan program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) untuk melindungi bayi, serta mengintegrasikan penanganan HIV dengan infeksi lain seperti Tuberkulosis (TB) dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

**Tabel 1.** Kasus HIV di Puskesmas Provinsi Iayapura Pada Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Jumlah Kasus HIV
1	Puskesmas Waena	79
2	Puskesmas Jayapura Utara	58
3	Puskesmas Abepura	51
4	Puskesmas Imbi Kota	46
5	Puskesmas Yoka	45
6	Puskesmas Abepante	38
7	Puskesmas Kotaraja	37
8	Puskesmas Tanjung ria	33
9	Puskesmas Twano	30

No.	Nama Puskesmas	Jumlah Kasus HIV
10	Puskesmas Emereuw	29
11	Puskesmas Hamadi	23
12	Puskesmas Koya barat	14
13	Puskesmas Skouw	5

Sumber Data : <https://jubi.id/penkes/2025/ini-puskesmas-dengan-kasus-hiv-tertinggi-di-kota-jayapura/>

Data pada tabel tersebut menunjukkan variasi jumlah temuan kasus HIV di berbagai wilayah kerja puskesmas di Jayapura sepanjang tahun 2024. Puskesmas Waena tercatat memiliki beban kasus tertinggi dengan 79 laporan, disusul oleh Puskesmas Jayapura Utara dan Abepura yang masing-masing mencatat 58 dan 51 kasus. Beberapa puskesmas lain seperti Imbi Kota, Yoka, Abepante, dan Kotaraja menunjukkan angka yang cukup signifikan di kisaran 37 hingga 46 kasus, sementara Puskesmas Tanjung Ria, Twano, dan Emereuw mencatat sekitar 29 sampai 33 kasus. Di sisi lain, angka temuan yang lebih rendah terlihat di Puskesmas Hamadi dengan 23 kasus dan Koya Barat dengan 14 kasus. Puskesmas Skouw menjadi wilayah dengan jumlah temuan paling sedikit, yakni hanya 5 kasus HIV, yang sekaligus menjadi angka terendah dalam pendataan di tahun tersebut (Makabori, 2025).

Pada tahun 2025, Kota Jayapura menghadapi situasi darurat dengan total 9.000 kasus HIV, di mana 1.200 di antaranya merupakan temuan baru. Pemerintah Provinsi Papua merespons melalui kebijakan strategis dan penguatan Perda No. 8 Tahun 2010 yang menjamin ketersediaan ARV, kewajiban terapi bagi pasien positif, serta perlindungan intensif ibu hamil. Strategi ini juga mengintegrasikan jalur edukasi lewat modul muatan lokal dari SD hingga perguruan tinggi serta penyuluhan remaja di lapangan guna mengubah perilaku masyarakat dan menekan angka penularan secara signifikan. Inisiatif ini didukung oleh aksi lapangan seperti peningkatan pengetahuan remaja di Posyandu Remaja Puskesmas Kampung Harapan. Sinergi antara kebijakan hukum, akses kesehatan yang inklusif, dan edukasi dini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat serta menekan angka penularan HIV secara signifikan di Tanah Papua.



**Gambar 1.** Penyuluhan seputar HIV/AIDS

Sumber Data: <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/>

**Tabel 2.** Pengetahuan Remaja Seputar HIV/AIDS

No	Tingkat Pengetahuan	Pre Test	Persentase (%)	Post Test	Persentase (%)
1	Tinggi	1	4	19	76
2	Sedang	3	12	6	24
3	Rendah	21	84	0	0
	Jumlah	25	100	25	100

Sumber Data: <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/>

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali para remaja dengan pengetahuan mengenai HIV/AIDS. Sebelum materi disampaikan, para peserta mengikuti tes awal (*pre-test*) untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar remaja, yaitu sebanyak 21 orang (84%), masih memiliki pemahaman yang rendah. Setelah itu, dilakukan penyuluhan mendalam tentang HIV/AIDS menggunakan bantuan selebaran atau leaflet. Hasilnya sangat positif, di mana setelah penyuluhan, tingkat pemahaman mereka meningkat tajam dengan 19 peserta (76%) berhasil meraih nilai pengetahuan yang tinggi. Harapannya, ilmu yang sudah didapat ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar para remaja dapat menjaga diri dari penularan HIV/AIDS, sehingga angka kasus di kalangan generasi muda dapat terus ditekan (Handayani, 2024).

Penyuluhan HIV di Posyandu Remaja Puskesmas Kampung Harapan, Jayapura, menjadi langkah strategis untuk membekali generasi muda dengan informasi pencegahan serta menumbuhkan empati guna menghapus stigma dan diskriminasi. Edukasi ini penting mengingat hingga akhir 2025, kasus HIV di Kota Jayapura belum menunjukkan penurunan, dengan temuan kasus baru tetap tinggi di angka 1.200 per tahun hingga mencapai total 9.000 penderita. Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi sesuai protokol Kementerian Kesehatan untuk menekan angka penularan melalui deteksi dini dan penguatan peran remaja sebagai agen perubahan di masyarakat.

## KESIMPULAN

Penanganan HIV/AIDS di Provinsi Papua selama periode 2024–2025 menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian epidemi. Pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan penyedia sumber daya utama melalui penyusunan kebijakan nasional, penyediaan alat tes, serta jaminan ketersediaan obat antiretroviral (ARV) secara gratis. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua menjalankan peran implementatif dengan menjadikan HIV/AIDS sebagai prioritas pembangunan daerah dan mengoptimalkan peran Puskesmas sebagai garda terdepan dalam layanan deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan penularan, termasuk pada ibu hamil.

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan cakupan layanan kesehatan belum sepenuhnya mampu menekan laju penambahan kasus baru, khususnya di Kota Jayapura yang hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai sekitar 9.000 kasus. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perubahan pola perilaku seksual yang sulit dipantau, keterbatasan akses layanan di wilayah pedalaman, serta masih kuatnya stigma sosial yang menghambat kepatuhan pengobatan dan deteksi dini.

Dengan demikian, penanggulangan HIV/AIDS di Papua tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan medis semata, melainkan memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan edukasi berkelanjutan bagi generasi muda, pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam penghapusan stigma, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan terpadu ini menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target Ending AIDS 2030 dan melindungi keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amu, I., Lengkong, F., & Tampi, G. (2020). Implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88).

- [2] Destrio, Y. R. (2024). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah timbulnya penyakit HIV-AIDS: Pemerintah Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4096>
- [3] Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2018). Pencegahan HIV/AIDS melalui collaborative governance antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Natapraja*, 6(2), 22188. <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.22188>
- [4] Fritantus, Y., & Rukminingsih, N. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01). <https://doi.org/10.30996/jpap.v1i01.405>
- [5] Gunawan, I. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- [6] Handayani, E. P. (2024). Peningkatan pengetahuan remaja seputar HIV/AIDS di Posyandu Remaja Puskesmas Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat BANGSA*, 1(3), 3177. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmmba/>
- [7] Hanifah, L., & Kriswibowo, A. (2024). Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dalam perspektif health policy triangle analysis di Kota Surabaya. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2827>
- [8] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). Menkes canangkan gerakan tes HIV untuk tingkatkan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. <https://kemkes.go.id/id/menkes-canangkan-gerakan-tes-hiv-tingkatkan-pencegahan-dan-pengendalian-hivaid>s
- [9] Khairunisa, N. S. (2019). Determinan pembangunan daerah dan angka HIV/AIDS di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(1).
- [10] Makabori, H. (2025). Ini puskesmas dengan kasus HIV tertinggi di Kota Jayapura. <https://jubi.id/penkes/2025/ini-puskesmas-dengan-kasus-hiv-tertinggi-di-kota-jayapura/>
- [11] Maya, G. A. K. S. (2020). RKUHP mengancam lapas: Analisis situasi pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan dan dampak RKUHP pada penanggulangan HIV/AIDS dalam lapas. Erasmus A. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.
- [12] Pemerintah Provinsi Papua. (2025). Kasus HIV/AIDS Papua tembus 26 ribu kasus. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-4302/kasus-hivaid-papua-tembus-26-ribu-kasus.html>
- [13] Poernomo, A. B. (2025). Angka HIV-AIDS di Jayapura melonjak, ODHA soroti ketiadaan aksi nyata. ParaparaTV. <https://www.parapatv.id/2025/04/angka-hiv-aids-di-jayapura-melonjak-odha-soroti-ketiadaan-aksi-nyata/>
- [14] Rupiarsieh. (2025). Evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 4(1). <https://doi.org/10.56071/jian.v4i1.361>
- [15] Saputra, T., Zuhdi, S., Sari, F. M., Sufi, W., & Eka. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS: Studi collaborative governance di Kota Pekanbaru. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.
- [16] Sya'ban, H. (2022). Peran United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dan pekerja sosial dalam penanganan isu HIV/AIDS di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 22.